



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : PIMPINAN LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMZULIAN RIFAI
2. Jabatan : KETUA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 90796

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.725.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 605 m²/125 m² di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m²/210 m² di KOTA LUBUKLINGGAU , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 9.014 m² di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 6.083 m² di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 807 m² di KOTA LUBUKLINGGAU , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 1.805 m² di KOTA LUBUKLINGGAU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m²/75 m² di OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m²/200 m² di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 1.092 m²/600 m² di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m²/129 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 522.000.000

1. MOTOR, HONDA CS-1 SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL



SENDIRI	Rp.	12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	200.000.000
3. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	310.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	---
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.281.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.281.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.